

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dian Aries Mujiburohman. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Program Studi Diplomatik IV Pertahanan.
- Djunaedi Eddy, Rohaedi Edi, Slamet Kadar, 2003. *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*
- Faisal Akbar Nasution. 2023 . *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika Offest
- Filmon Mikson Polin, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Malang: Media Nusa Creative
- Helmi, Fauzi Syam, Fitria, Latifah Amir, Ratna Dewi, Melia Rizki Ruswandi. 2025. *Buku Ajar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Jambi: UNJA Publisher
- Joey Dava Hanafiah Albi. 2025. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Mau Hedwig, Ditisram Tinton, 2024. *Hukum Tatat Negara Indonesia Teori dan Penerapannya*
- Marojahan JS Panjaitan. 2022. *Kemanfaatan Hukum Kemudahan Perizinan Berusaha Membangun Investasi dan Perekonomian di Indonesia*. Bandung: Penerbit Reka Cipta
- Mulyadi Lilik, 1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*
- Soerjono Soekanto. 2006. “*Pengantar Penelitian Hukum*” . Jakarta:UI-Press

Soerjono Soekanto, Mamudji Sri. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: PT Rajagrafindo Perseda

Titik Triwulan T, Ismu Gunandi Widodo. 2011 . *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara*

Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.

Peraturan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah

Sumber jurnal

Aidah Nur Khansa, “ Pencabutan Izin Tambang Oleh Bkpm: Telah Proses Pencabutan Dan Kewenangannya Revocation Of Mining Permit By Bkpm: Explain The Repeal Process And Its Authority ” Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (November 2024)

Arianti, R. S., Anasthalia, D., Savana, L., Zakiyyati, K. A. P., & Gusthomi, M. I. (2026). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/Tun/2022 dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha PT. Tambang Mas Sangihe. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4107-4116.

Armin Hasti, Abrar Saleng dan JuajirSumarji, Kewenangan KBPM dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, Tahun 2023.

Dadang Apriyanto “Perlindungan Hukum Berusaha Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia” Jurnal Penelitian dan Inovasi Hukum Vol. 9 No. 3 Tahun 2025.

Desuardi Nafiasah Aurellia “Pencabutan Izin Usaha Pertambangan : Studi Kasus PTUN No.244/G/2024, ” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 9, No. 1, 23 Juni 2025

Sumber Putusan :

Putusan No.85/G/2025/PTUN.JKT

Putusan No.201/B/2025/PT.TUN.JKT

Putusan No. 120 K/TUN/2026